



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 625-634

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program *Disarmament, Demobilization and Reintegration* oleh Satuan Tugas MONUSCO di Kongo Tahun 2015-2018

Vito Savero^{1✉}, Yoedhi Swastanto², Fauzia Gustarina Cempaka Timur³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: Vitosavero81@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perjalanan konflik yang ada di Republik Demokratik Kongo tidak selalu berjalan baik, selama beberapa decade konflik-konflik telah terjadi dan mengakar di masyarakat sipil sehingga tetap menemukan cara untuk terus tumbuh dan berkembang. Merujuk kepada tahun 2015, konflik masih terjadi di Republik Demokratik Kongo dengan permasalahan utama yang mempunyai aktor utama mantan Presiden Joseph Kabila melawan beberapa kelompok bersenjata yang mempunyai tujuan masing-masing dan telah tersebar di penjuru negeri. Semenjak konflik berlangsung, Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Dewan Keamanannya yang mempunyai sub-organisasi yang bernama UN Peacekeeping telah menerjunkan satuan tugasnya yang bernama Monusco. Satuan tugas ini mempunyai misi utama untuk membangun perdamaian di Kongo dengan menjalankan program yang dinamakan DDR yaitu Disarmament, Demobilization and Reintegration program. Melihat sejarah pelaksanaan program ini, telah dilaksanakan program ini dalam DDR I dan DDR II yang telah dilaksanakan pada tahun 1998 dan 2004 guna menyelesaikan konflik yang ada, sehingga pada tahun 2015 Monusco dimandatkan untuk melaksanakan program DDR III kembali guna membantu pemerintah Kongo menyelesaikan perang sipil yang belum pernah tuntas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisa serta mendeksripsikan peran – peran Monusco dalam pelaksanaan program DDR dengan berbagai temuan, data serta fakta yang ada di lapangan guna menyelesaikan masalah utamanya.

Kata Kunci: *Democratic Republic of the Congo, United Nations, Security Council, UN Peacekeeping, Monusco, DDR*

Abstract

The conflict condition In Republic Democratic of The Congo not doing well. Over the couple decades, numerous conflict that has been rooted into the grassroot of the society still find its way to emerge. Looking into the year of 2015, the conflict still going in the Republic Democratic of The Congo with the main problem getting circulated into civil war between the supporters of Former President Joseph Kabila versus many armed groups that has been operating around the country with variants goal they want to achieve. Since the conflict began, United Nations that have Security Council inside of them with the sub-organization UN Peacekeeping decided to deploy their Peacekeeping troops around the country onf Republic Democratic Of The Congo, the name of the task force that has been given the mandate to operate around conflict areas are United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo (MONUSCO). This task force primary objective are to establish peace in the Congo with peace program that has been named Disarmament, Demobilization and Reintegration Programme. Looking into the history of this program, there has been DDR I, DDR II that have been launched in 1998 and 2004 to end the conflict, so in 2015 Monusco conduct another DDR III Programme to help this country ending the war that never been done before. This study aims to analyse the role of Monusco to establish peace and executed the DDR Programme with variants data and experienced on the field to finish the main problem.

Keywords: Republic Democratic of the Congo, United Nations, Security Council, UN Peacekeeping, Monusco, DDR, Disarmament, Demobilization, Reintegration

PENDAHULUAN

Konflik adalah sesuatu yang sulit dihindari dalam jalannya kehidupan sehari – hari baik oleh individu, organisasi, daerah bahkan negara. Dengan konflik yang ada, beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian dari konflik itu sendiri, menurut Webster (1966) didalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin ‘konflik’ dalam bahasa aslinya adalah mempunyai arti perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yang dimaknai sebagai konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Dalam pendapat lainnya, konflik merupakan berkembangnya ketidaksepakatan, yang tidak memenuhi prasyarat dasar dan biasanya melatarbelakangi adanya sifat- sifat konflik, hingga pihak yang berkonflik secara aktif berusaha untuk mencelakakan pihak –pihak lainnya.

Dalam perkembangan konflik yang ada di Republik Demokratik Kongo, Pertengahan tahun 2015 hingga awal 2017 adalah rentang waktu yang penting terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Beberapa aspek yang menyebabkan konflik seperti ditundanya pemilihan umum Presiden dan legislatif, tingkat kekerasan yang semakin meningkat di Provinsi Kasai, pemimpin oposisi yang telah lama menentang pemerintah terbunuh dan berbagai kekerasan terjadi di wilayah Timur Kongo yang terus

berlanjut . Tetapi Pemantik utama dari perang sipil yang mulai berkecamuk tahun itu adalah Presiden Petahana Joseph Kabila yang mempunyai waktu jabatan hingga 27 November 2016 tetap tidak mau turun dari singgasana kepresidenannya. Selanjutnya, sang incumbent tetap berada dalam kekuasaan konstitusionalnya walaupun masa resminya sudah habis pada 19 Desember 2016 . Segala konflik yang terjadi pada tahun 2016 itu pada kesimpulannya berakar daripada ketidakmauan Presiden Joseph Kabila untuk turun dari jabatan kepresidenannya yang telah dijabat sebanyak 2 periode yang akhirnya memicu berbagai kekerasan dan perang saudara di negara itu sehingga PBB merasa perlu untuk menurunkan Pasukan Perdamaianya disana.

Dalam melihat sebaran konflik yang begitu luas dan rumit ini, ditemukan fakta bahwa hingga saat ini ada lebih dari 100 kelompok bersenjata di Kongo yang menguasai dan mengontrol berbagai daerah di bagian Timur Republik Demokratik Kongo . Dibalik latar belakang konflik perang sipil yang utamanya dipicu oleh penolakan Presiden Petahana Joseph Kabila yang tidak mau turun dari jabatannya, sebab – sebab lain seperti lemahnya pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang tidak jalan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi, konflik-konflik sebelumnya yang belum terselesaikan semakin memperkeruh dan menguatkan akar konflik yang terjadi di Kongo hingga berlarut-larut . Melihat akar permasalahan dan sebaran konflik yang begitu luas di Kongo telah menyebabkan 4,5 Juta penduduk keluar dari negaranya, serta 13,1 Juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, bertambah 5,6 Juta penduduk semenjak 2017.

Dalam kejadian konflik yang berkepanjangan hingga banyak memakan korban kemanusiaan yang ditambah dengan kerugian harta benda, MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo) diberikan mandat pertama kali oleh Dewan Keamanan PBB untuk diterjunkan menyelesaikan konflik dan mengawal perdamaian disana pada 1 Juli 2010. Pelaksanaan mandate ini tertuang pada Resolusi 1925 pada 28 Mei yang berisi perintah kepada MONUSCO untuk menggunakan seluruh kapasitas yang ada guna melaksanakan mandat yang didalamnya mencakup perlindungan kepada warga sipil, personel bantuan kemanusiaan, serta aktivis pembela Hak Asasi Manusia dari segala ancaman bersifat fisik dan mendukung pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam melaksanakan stabilisasi serta usaha-usaha dalam mengkonsolidasikan perdamaian.

Dalam melihat pelaksanaan tugasnya, MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo) mendapat mandate operasi untuk mengawal program DDR III yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Demokratik

Kongo pada tahun 2015 . Program DDR III ini bisa berjalan dikarenakan kekalahan kelompok pemberontak yang bernama Mouvement du 23 Mars (M23) dimana mereka telah diserang oleh gabungan pasukan dari MONUSCO's New Force Intervention Brigade (FIB), DRC National Army dan Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sehingga akhirnya kekalahan kelompok bersenjata ini memicu beberapa kelompok lainnya untuk ikut menyerah serta melucuti senjatanya masing-masing guna dapat bergabung kedalam program DDR III ini.

Adapun mandate yang tertuang di poin ke empat di dalam Resolusi 1925 dimana berisi perintah wewenang kepada UN MONUSCO untuk melaksanakan kegiatan DDR berbunyi: "Stressing the primary responsibility of the Government of the Democratic Republic of the Congo for ensuring security in its territory and protecting its civilians with respect for the rule of law, human rights and international humanitarian law, stressing the urgency of implementing comprehensive security sector reform and of achieving as appropriate the disarmament, demobilization, reintegration (DDR) of Congolese armed groups, and the disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration (DDRRR) of foreign armed groups for the long-term stabilization of the Democratic Republic of the Congo, considering the need to create the security conditions for ensuring sustainable economic development, and stressing the importance of the contribution made by international partners in these fields".

Dalam menyelesaikan konflik perang saudara yang sudah lama berlangsung di negaranya, pemerintah Kongo membutuhkan adanya kerjasama dengan aktor – aktor lainnya seperti negara-negara tetangga yang berbatasan langsung secara teritori dengan negaranya maupun dengan organisasi internasional, kegiatan ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan internasional mengingat bahwa sejarah konflik yang ada di Kongo sendiri merupakan konflik lanjutan yang telah berlarut-larut permasalahannya dari dulu hingga kini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kongo adalah dengan meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) yang melalui Dewan Keamanan PBB memberi mandate secara khusus kepada United Nation Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of The Congo (UN MONUSCO).

Berdasarkan data yang telah terhimpun, dapat diketahui bahwa beragam aksi kekerasan yang mewarnai konflik saudara yang ada di Kongo memulai eskalasi di tahun 2016 dan mencapai puncak kulminasi tertinggi di 2017. Beragam konflik mulai dari kerusuhan sipil, kontak senjata antar kelompok bersenjata, penculikan/penghilangan paksa, korban kegiatan politik serta penjagaan keamanan insani dengan presentase tertinggi pada

kegiatan kontak tembak antar kelompok bersenjata yang memakan korban hingga lebih dari 900 orang pada tahun itu.

Melihat data yang telah dijabarkan dalam table, terdapat penurunan signifikan pada 3 aksi konflik kekerasan yang mempunyai presentase jumlah kegiatan serta korban paling tinggi dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu yang paling signifikan penurunannya adalah kegiatan serta korban dari konflik bersenjata antar kelompok bersenjata, disusul oleh penurunan korban dan kegiatan dari gejolak politik dan yang terakhir adalah kegiatan serta korban dari penjagaan keamanan insani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UN MONUSCO memberikan upaya yang baik dan bisa dikatakan berhasil dalam membantu Pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam menangani berbagai aksi kekerasan serta kerusuhan yang ada di negaranya sehingga dapat menciptakan situasi pemeliharaan perdamaian yang stabil dan memberikan dampak yang nyata terhadap warga negara dari Kongo itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam sebab ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran yang dilaksanakan oleh UN MONUSCO sebagai sebuah organisasi internasional yang telah turut andil dalam menciptakan perdamaian secara khusus meredam serta menekan potensi, kegiatan serta korban akibat konflik yang terjadi di Kongo. Penulis menggunakan UN MONUSCO sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus konflik kekerasan di Kongo karena penulis ingin melihat peran serta dampak organisasi internasional dalam bidang pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan perlindungan (protection) dan pencegahan (prevention). Dimana tindakan yang dilakukan oleh UN MONUSCO tersebut merupakan tindakan – tindakan yang telah sejalan dan sesuai dengan tujuan awal pembentukan UN MONUSCO itu sendiri.

Tinjauan Pustaka (Level 1)

DDR atau Disarmament, Demobilization and Integration adalah merupakan kerangka kerja untuk pemeliharaan keamanan dan membangun perdamaian yang berfokus kepada individu yang terlibat konflik, pemeliharaan perdamaian jangka panjang guna kepentingan keamanan dan pembangunan. Pada tahun 2016 -2018 proses DDR telah dilaksanakan oleh UN Peacekeeping Operations dalam beberapa wilayah satuan tugas di benua Afrika seperti MINUSCA di Republik Afrika Tengah, UNAMID di Darfur, MINUSMA di Mali, UNMISS di Sudan dan tentu saja telah dilakukan oleh satuan tugas MONUSCO yang mendapat wilayah operasi di Republik Kongo. DDR diintroduksi pertama kali pada tahun 1989 melalui organisasi United Nations Observer Group in Central America (ONUCA). Setelah diintroduksi pada tahun itu, United Nations sendiri telah mengimplementasikan dan mendukung DDR

dalam cakupan wilayah operasi meliputi lebih 20 negara di seluruh dunia yang terdampak konflik, baik melalui operasi peacekeeping atau tidak.

DDR dalam pengertian yang disampaikan oleh UN adalah sebuah program yang melahirkan kontribusi serta menjaga stabilitas keamanan negara – negara pasca konflik sehingga suatu negara dapat membangun kembali negaranya yang terdampak konflik. Tujuan umum dari DDR ialah guna mengatasi serta meredam isu-isu keamanan yang muncul pada situasi setelah konflik dimana biasanya para kombatan tidak memiliki penghasilan, perasaan terasing dan tidak mempunyai tempat di masyarakat selama proses penyelesaian konflik menuju terciptanya perdamaian.

Berdasarkan United Nations, ada tiga kemungkinan yang dapat diupayakan dalam jalannya penyelesaian konflik yaitu Disarmament, Demobilization dan Reintegration . DDR merupakan hal utama dari integrasi proses tercapainya perdamaian setelah konflik yang membentuk secara jelas tujuan dari operasi perdamaian itu sendiri. Program ini juga merupakan langkah penting dari proses stabilisasi lingkungan masyarakat yang dampaknya adalah pembangunan jangka panjang terhadap negara yang dirudung konflik. Dalam pelaksanaannya, program ini harus dimasukkan dalam proses perdamaian secara menyeluruh yang ada dalam kegiatan pemeliharaan perdamaian. Dalam langkahnya, DDR juga harus dilaksanakan secara runtut sehingga tujuan-tujuan yang ada di dalamnya dapat dicapai secara prima.

Program DDR sendiri atau yang biasa disebut Disarmanent, Demobilization dan Reintegration adalah kerangka kerja yang telah dirancang oleh UN yang diimplemetsiikan oleh UN Peacekeeping melalui satuan-satuan tugas yang ada di bawahnya sesuai daerah konflik yang ada dalam upaya dari masa perang menuju kepada masa damai. Program DDR itu sendiri menitik beratkan kegiatan pada bidang keamanan serta memelihara stabilitas setelah konflik yang nantinya akan berujung pada perbaikan lingkungan masyarakat dan pembangunan negara. Dalam pelaksanaan dari DDR itu sendiri, yang biasanya melibatkan mantan kombatan perang membutuhkan berbagai macam proses yang beragam dimana melibatkan pihak - pihak militer, ekonomi,politik, keamanan dan sosial. Tujuan utama yang harus dicapai dari DDR adalah membuat mantan kombatan perang dapat kembali melaksanakan kehidupan mereka yang bersifat sipil di lingkungan masyarakat yang ada.

Kegiatan dari DDR sendiri adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan berbagai actor yang mempunyai konflik guna saling bekerja sama dan membangun dalam partisipasi kegiatan DDR dalam melahirkan perdamaian. Dalam program DDR sendiri terdapat dua tujuan utama yaitu:

- a. Jangka Pendek: Menciptakan keamanan dan stabilisasi pada konflik dengan kegiatan Disarmament dan pembebasan kombatan perang melalui kegiatan Demobilization.
- b. Jangka Panjang: Kegiatan Reintegration yang meliputi aspek sosial dan ekonomi mantan kombatan perang, yang bertumpu pada tujuan terhadap kombatan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan mempunyai manfaat yang berarti.

Dalam pelaksanaan seutuhnya di lapangan, DDR mempunyai kegiatan masing yang meliputi:

- a. Disarmament: kegiatan pengumpulan, pengontrolan, pemusnahan, penyimpanan senjata, bahan peledak, amunisi dari para kombatan perang kepada pihak yang berwajib.
- b. Demobilization: kegiatan penghapusan status kombatan dari kombatan yang berasal dari angkatan bersenjata ataupun kelompok pemberontak.
- c. Reintegration: kegiatan serah terima mantan kombatan yang dikembalikan pada tempatnya yaitu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan kondisi dasar dari peristiwa yang disebutkan dan penjelasan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami peran dari UN MONUSCO dalam pemeliharaan perdamaian di Kongo dalam periode 2017 – 2019.

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk focus terhadap peran dari aktor dalam penanganan masalah yang dibahas. Dalam hal ini berarti penulis focus terhadap peran dari UN MONUSCO sebagai organisasi internasional yang membantu dalam proses pemeliharaan perdamaian secara khusus dalam lingkup negara Kongo pada tahun 2017 -2019.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai literature yang berhubungan dengan kasus penelitian. Literature tersebut dapat berupa buku, jurnal, termasuk juga website di internet dari berbagai sumber terpercaya. Melalui teknik tersebut

maka data yang dihasilkan adalah data sekunder karena berasal dari berbagai literature atau referensi dan merupakan data hasil olahan dari referensi tersebut.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan kajian pustaka. Setelah penuliss mengumpulkan data-data sekunder tersebut maka penulis melakukan analisa untuk mencoba mengkorelasikan antara konsep yang digunakan dengan mondisi fenomena yang terjadi. Melalui analisa tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan apakah konsep yang digunakan mampu menjelaskan dan menggambarkan persamalasan yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan program Disarmament, Demobilization & Reintergration III yang dilaksanakan oleh United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republik Of The Congo (MONUSCO), penulis berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan DDR III bisa dilaksanakan dengan cukup baik oleh satuan tugas ini, Monusco dirasa sudah cukup mampu dalam memetakan permasalahan yang ada di lapangan dimana biasanya didominasi oleh konflik pertempuran perebutan wilayah, kerusuhan lokal dan gerakan-gerakan separatis yang pergerakannya cepat dan taktis dikarenakan mengenal medan operasi dengan sangat baik. Harapan besar yang dibawa oleh para pemegang kuasa guna pelaksanaan program ini adalah terciptanya situasi yang damai di wilayah konflik dengan mengedepankan unsur-unsur non-violence dalam pendekatannya terhadap pihak-pihak yang berkonflik, program DDR III senndiri juga dilaksanakan guna sebagai pembaharuan daripada program DDR I & II yang banyak dianggap gagal oleh berbagai pihak dalam hal penyelenggaraan program dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya.

Penulis juga berpendapat bahwasannya pelaksanaan program DDR III oleh Monusco dirasa sudah cukup baik tetapi tetap ada beberapa hambatan yang membuat jumlah varian konflik serta jumlah korban jiwa akibat konflik diantara rentang waktu tahun 2016 hingga 2018 menjadi sangat fluktuatif mengikuti perkembangan dinamika konflik-konflik langsung yang ada di lapangannya. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi sulitnya pelaksanaan program – program seperti ini di lapangan adalah seperti sulitnya akses jalan menuju daerah utama rawan konflik, kurangnya jumlah personel kontingen yang bertugas di lapangan, terbatasnya akses teknologi informasi yang disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan dan yang utama kurangnya pendanaan terhadap program – program yang

ada membuat pelaksanaan DDR III ini dirasa belum terlalu maksimal guna mencapai target tujuan operasi yang ada.

SIMPULAN

Sebagai sebuah penelitian kualitatif tentunya keseluruhan penelitian ini tidak lepas dari bias dan subjektivitas penulis. Studi kasus dan rumusan masalah dalam penelitian ini mengarahkan pada kerangka konseptual yang digunakan, yaitu program DDR. Dengan demikian, bagaimana metodologi penelitian ini yang dijelaskan dalam Bab III, dapat ditentukan. Tentunya setiap bentuk model atau metodologi penelitian memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah subjektivitas yang menjadi kesatuan dengan analisa dan interpretasi yang dilakukan. Sehingga untuk merujuk berbagai sumber dan penggunaan referensi yang kredibel menjadi hal yang penting dalam bentuk penelitian kualitatif. Selain itu, dalam perihal pengumpulan data, penelitian ini hampir secara keseluruhan menggunakan metode studi literatur. Objek penelitian yang tidak terjangkau penulis secara spasial, mendorong penggunaan literatur termasuk 79 literatur ilmiah maupun media yang dapat memberikan deskripsi yang terstruktur dalam penelitian ini. Media yang digunakan penulis sebagai sumber referensi dan rujukan mengenai studi kasus maupun akumulasi data lainnya, tentunya juga memiliki muatan subjektivitas dan bias sebagai sebuah literatur. Dalam konteks media dan informasi, framing menjadi hal yang mutlak dalam sebuah pemberitaan pada sebuah isu.

Untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian ini, evaluasi kinerja pelaksanaan program berdasarkan data – data yang telah dijabarkan menjadi rencana utama yang cukup penting. Tentunya dalam setiap permasalahan konflik yang ada di suatu negara acapkali banyak factor penyebab kegagalan yang menghambat proses terciptanya perdamaian di daerah konflik, dengan membeberkan data – data terkait pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan dengan memetakan hambatan – hambatan yang ada di lapangan dirasa mampu dilakukan guna mencapai hasil yang lebih maksimal dalam program ini. Dan juga ketika pihak – pihak yang mempunyai keinginan yang sama untuk mengakhiri berbagai konflik yang ada dengan melaksanakan ketentuan program yang sudah dijabarkan oleh pihak terkait maka tercapainya suatu kestabilan keamanan yang bebas dari konflik merupakan hasil akhir dari semua usaha yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Armed Actors. 2013. Armed Groups and the Role of Organizational Control. Small Arms Survey. No. 1
- Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). 2004. Principles of Intervention and Management in Peacekeeping Operations.
- Ian Douglas. 2004. Disarmament, Demobilization, and Reintegration A Practical Field and Classroom Guide. Germany: Druckerei Hassmuller Graphische Betriebe GmbH & Co
- Michael Nicholson. Rationality and the Analysis of International Conflict. Cambridge University Press.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. (Bandung, Refika Aditama).
- UN Department of PKO. 2010. Second Generation Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) Practices in Peace Operations.
- UNDDR. 2014. Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standards (IDDRS).